

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH  
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
SAMPAH DI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG  
(Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah)**

**Nurmalasyiah\*, Lilis Suryani\***

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong  
Kompleks Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung  
Tabalong, Telp./Faks. 0526-2022484

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong, baik langsung maupun tidak langsung. Responden berjumlah 60 orang, terdiri dari 30 petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Distrik Tabalong dan 30 orang masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode alternatif Partial Least Squares (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak ada pengaruh signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; 2) tidak ada pengaruh signifikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; 3) ada pengaruh signifikan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong; dan 4) tidak ada pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kecamatan Tabalong. Saran bahwa DLH dapat melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.

Kata kunci: implementasi kebijakan; partisipasi masyarakat; efektivitas pengelolaan sampah

---

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION WASTE MANAGEMENT POLICY ON  
SOCIETY PARTICIPATION AND EFFECTIVITY OF WASTE MANAGEMENT IN  
MURUNG PUDAK SUB REGENCY TABALONG REGENCY  
(Local Regulation No. 14 Of 2011 About Waste Management In Tabalong Regency)***

**ABSTRACT**



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

*This study aims to analyze the influence of implementation waste management policy on society participation and effectivity of waste management in Murung Pudak Sub Regency Tabalong Regency, directly or indirectly. Respondents are 60 people, consisting of 30 cleaning personnel from Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabalong District and 30 people society in Murung Pudak Subdistrict Tabalong District. Data analysis technique used is Structural Equation Modeling (SEM) with alternative method of Partial Least Squares (PLS) using SmartPLS 3 software .*

*The results showed that: 1) there is no significant influence of implementation waste management policy on society participation in Murung Pudak Sub Regency Tabalong Regency; 2) there is no significant influence of implementation waste management policy on effectivity of waste management in Murung Pudak Sub Regency Tabalong Regency; 3) there is significant influence of society participation on effectivity of waste management in Murung Pudak Sub Regency Tabalong Regency; and 4) ) there is no significant influence of implementation waste management policy on through society participation on the effectivity of waste management in Murung Pudak Sub Regency Tabalong Regency. Suggestion that DLH can do socialization actively to the society about waste management based on Local Regulation No. 14 of 2011 about Waste Management in Tabalong District.*

*Keywords: policy implementation; society participation; effectivity of waste management*

## PENDAHULUAN

Dikeluarkannya UU no. 32/2004 tentang Otonomi Daerah dan PP no. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tanggung jawab penanganan sampah perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah (Pemda), dengan harapan bahwa efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah perkotaan akan meningkat.

Menindaklanjuti hal ini Kabupaten Tabalong melalui Dinas Tata Kota dan Kebersihan (Distakober) melakukan

sosialisasi peraturan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tabalong.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali memberikan himbauan kepada masyarakat masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan Dinas Tata Kota dan Kebersihan (Distakober) Kabupaten Tabalong sekarang lebih dikenal dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabalong agar masyarakat bisa hidup bersih dan mengelola sampah sendiri.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pola hidup bersih itu membuang sampah harus di tempat pembuangan sementara (TPS) yang sudah disiapkan. Sedangkan pengelolaan sampah mandiri, tidak lain dilakukan dengan memilah sampah, kemudian dijadikan kompos. Pengelolaan sampah seperti ini diharapkan bisa mengurangi volume angkutan sampah ke TPA.

Namun dalam implementasinya, partisipasi dan efektivitas pengelolaan sampah oleh masyarakat masih belum maksimal. Ini dilihat dari pemilahan untuk sampah, masyarakat masih banyak yang melakukan pembuangan sampah tanpa mengetahui mana sampah organik dan mana sampah yang anorganik. Untuk pengangkutan sebagian masyarakatnya pun masih ada yang tidak mengetahui kapan sampah yang di TPS akan diangkut oleh petugas pengangkutan sampah.

Masih sering ditemui juga masyarakat yang membuang atau menumpuk sampah tidak pada tempat yang semestinya seperti di tempat-tempat yang sepi di tepi jalan. Ironisnya tumpukan itu sering kali berada tepat dibawah papan peringatan larangan membuang sampah ditempat tersebut. Penempatan tempat sampah di lokasi yang terlalu terbuka bisa mengganggu masyarakat juga menjadi

salah satu permasalahan apabila tidak terangkut tepat waktu.

Pengelolaan sampah yang tidak tepat dan tidak efektif dapat menyebabkan masalah terhadap lingkungan sekitar seperti penumpukan sampah, lingkungan yang kotor, bau tidak sedap, banyaknya alat serta kemungkinan terjadi penyebaran penyakit yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap kesehatan warga masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hernidyasari (2012), hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Jenawi (2008), menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sampah di perusahaan daerah kebersihan di Kota Bandung. Utari (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Ray (2017), diketahui bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Nurhafni (2016), menyebutkan apabila setiap rumah tangga dibiasakan untuk



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

memisahkan sampah organik dan non organik kemudian sampah organik diolah menjadi pupuk tanaman dapat dijual atau dipakai sendiri. Sedangkan sampah anorganik dibuang dan akan segera dipungut oleh para pemulung. Dengan demikian maka masalah sampah akan berkurang.

## KERANGKA TEORITIS

Menurut Nugroho (2008:55), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

William N. Dunn (1994) dalam Pasolong (2007:38-39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhuubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (2006) dalam Pasolong (2007:57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasi-kan suatu rencana ke dalam praktik.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya, dan benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operationalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan (Pasolong, 2007:57).

Menurut FAO (1989) dalam Mikkelsen (2011:58) pelbagai kajian, dokumen proyek, dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata partisipasi.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah ‘pemekaan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan pata staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, *monitoring* proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai

hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk (1996), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (1987) mengatakah bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (2004) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para *stakeholder* dari organisasi yang bersangkutan (Pasolong, 2007:4).

Definisi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis,

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah :

1. Pemilahan : dilakukan melalui memilih sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
2. Pengumpulan : dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
3. Pengangkutan : tetap terjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
4. Pengolahan : mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan TPA.
5. Pemrosesan akhir sampah : dilakukan dengan pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

## Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis berpengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak langsung.

Hipotesis pengaruh secara langsung:

H1 : Di duga ada pengaruh yang positif dan signifikan implementasi

kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

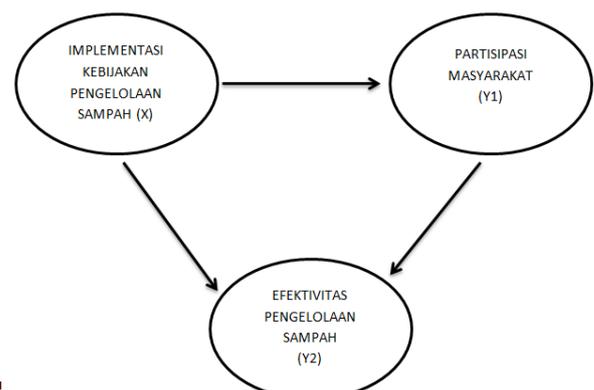
H2 : Di duga ada pengaruh yang positif dan signifikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

H3 : Di duga ada pengaruh yang positif dan signifikan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Hipotesis pengaruh secara tidak langsung

H4 : Di duga ada pengaruh yang positif dan signifikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

**Gambar 1. Model Penelitian**





Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Sumber: Peneliti, 2017

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif yaitu sebuah metode yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat secara kuantitatif atau dalam bentuk angka dengan meneliti hubungan antara variabel-variabel yang ada. Metode korelasional bertujuan meneliti sejauh mana variabel yang satu memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lain.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2014:173). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Mudak Kabupaten Tabalong.

Dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* dimana teknik pengambilan sample yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini menggunakan

*simple random sampling*, karena simple (sederhana) untuk pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dianggap homogen. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang, dengan komposisi 30 responden tenaga kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bagian Persampahan dan 30 responden lagi berasal dari masyarakat yang berdomosili di Kecamatan Murung Pudak.

## ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu :

### 1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dalam mengevaluasi model pengukuran SEM-PLS dilakukan dengan bantuan program SmartPLS. Evaluasi pengukuran pada SEM-PLS perlu dilakukan dua pengujian, yaitu Uji validitas dan realibilitas. Pada uji validitas dapat dilakukan dengan melihat *convergent validity* dan *discriminant validity* dari indikatornya.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Selain itu nilai dari *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk diharapkan lebih besar dari 0,5.

Pengujian reliabilitas bisa dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability*, nilai yang diharapkan berada pada skor diatas 0,7. Hasil pengujian secara menyeluruh bisa dilihat dari *Construct Reliability and Validity* dari *output* SmartPLS.

## 2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah uji validitas dan realibilitas kemudian membentuk model pengukuran, maka selanjutnya adalah menganalisis pengaruh antar variabel laten yang disebut model struktural (*inner model*). Evaluasi terhadap inner model dapat dilakukan dengan melihat besarnya  $R^2$  (*R-Square*). Semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen.

### Gambar 2. Model 2

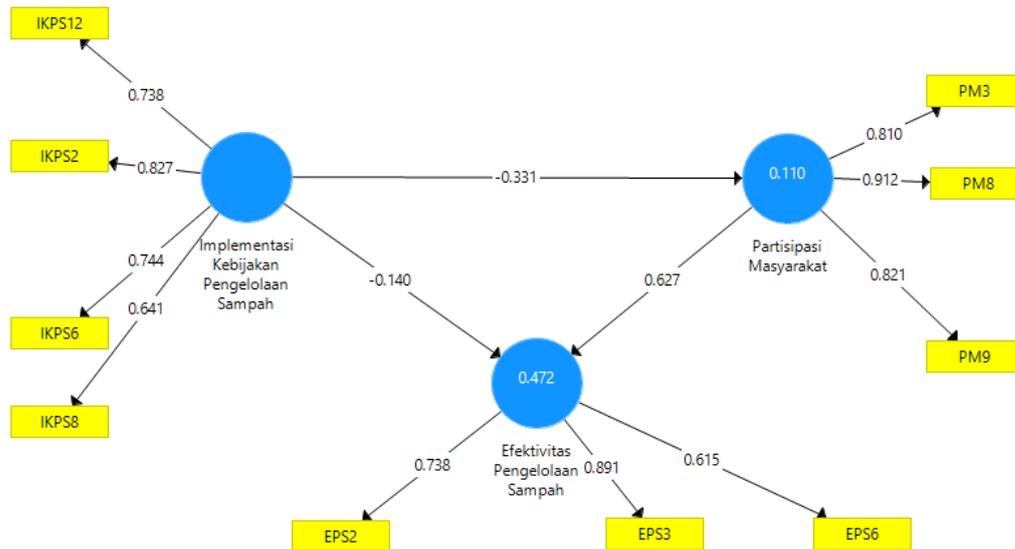
## 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian akan diuji menggunakan uji t dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai p *value* lebih kecil dari 0,05. Jika nilai p *value* lebih besar 0,05 maka hipotesis tidak bisa diterima karena dianggap tidak terbukti, atau dengan kata lain hipotesis tersebut ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun, demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2014:39).

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>



Sumber: *Output SmartPLS*

### 1. Evaluasi *Outer Model*

Evaluasi *Outer Model* penelitian ini dilakukan dengan mengeliminasi semua indikator dengan skor di bawah 0,6 setelah *Algorithm* pertama dilakukan. Hasil *Loading Factor* setelah *Algorithm* kedua untuk *Convergent Validity* adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Nilai Loading Factor**

	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah	Partisipasi Masyarakat	Efektivitas Pengelolaan Sampah
IKPS2	0.827		
IKPS6	0.744		
IKPS8	0.641		
IKPS12	0.738		
PM3		0.810	
PM8		0.912	
PM9		0.821	
EPS2			0.738
EPS3			0.891
EPS6			0.615

Sumber: *Output SmartPLS* diolah.

*Discriminant Validity* mengharuskan nilai *Cross Loading* indikator

berkorelasi paling tinggi terhadap konstruk variabelnya. Hasil *Cross Loading* masing-masing indikator diperlihatkan pada Tabel 2. Selain itu nilai dari *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk diharapkan lebih besar dari 0,5.

**Tabel 2. Nilai Cross Loading**

	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah	Partisipasi Masyarakat	Efektivitas Pengelolaan Sampah
IKPS2	<b>0.827</b>	-0.288	-0.440
IKPS6	<b>0.744</b>	-0.187	-0.203
IKPS8	<b>0.641</b>	-0.206	-0.020
IKPS12	<b>0.738</b>	-0.278	-0.154
PM3	-0.305	<b>0.810</b>	0.630
PM8	-0.276	<b>0.912</b>	0.652
PM9	-0.255	<b>0.821</b>	0.354
EPS2	-0.251	0.542	<b>0.738</b>
EPS3	-0.431	0.549	<b>0.891</b>
EPS6	-0.044	0.428	<b>0.615</b>

Sumber: *Output SmartPLS* diolah.

**Tabel 3. Nilai Construct Reliability and Validity**

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>rho_A</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah	0.751	0.842	0.828	0.549
Partisipasi Masyarakat	0.809	0.839	0.885	0.721
Efektivitas Pengelolaan Sampah	0.615	0.651	0.797	0.572

Sumber: *Output SmartPLS* diolah.

2. Evaluasi *Inner Model*

Evaluasi *Inner Model* dilakukan dengan melihat nilai dari  $R^2$  (*R-Square*). Hasil pengujian ditampilkan sebagai berikut:

**Tabel 4. Nilai R-Square**

Konstruk	Nilai $R^2$
Partisipasi Masyarakat	0.110
Efektivitas Pengelolaan Sampah	0.472

Sumber: *Output SmartPLS* diolah.

Nilai  $R^2$  dari model pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Partisipasi

Masyarakat adalah sebesar 0.110 atau 11%, sedangkan model pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah adalah sebesar 0.472 atau 47,2%.

3. Pengujian Hipotesis

Berikut tabel *output* hasil uji hipotesis menggunakan SmartPLS. Hasil pengujian hipotesis secara langsung disimpulkan berdasarkan tabel *Path Coefficients* sedangkan pengujian hipotesis tidak langsung disimpulkan berdasarkan tabel *Indirect Effects*.

**Tabel 5. Nilai Path Coefficients**

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Implementasi Kebijakan					

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Pengelolaan Sampah → Partisipasi Masyarakat	-0.331	-0.382	0.221	1.499	0.135
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah → Efektivitas Pengelolaan Sampah	-0.140	-0.128	0.228	0.614	0.539
Partisipasi Masyarakat → Efektivitas Pengelolaan Sampah	0.627	0.630	0.129	4.852	0.000

Sumber: *Output SmartPLS* diolah.

**Tabel 6. Nilai Indirect Effects**

	<i>Original Sample</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah → Partisipasi Masyarakat → Efektivitas Pengelolaan Sampah	-0.208	-0.246	0.151	1.377	0.169

Sumber: *Output SmartPLS* diolah.

Hasil uji pengaruh langsung dan tidak langsung berdasarkan *output* SmartPLS adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Partisipasi Masyarakat adalah negatif ( $R^2 = -0.331$ ) dan tidak signifikan ( $t = 1.499 < 2.042$ , *p value*  $0.135 > 0.05$ ). H1 tidak bisa dibuktikan, maka H1 ditolak.
2. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah adalah negatif ( $R^2 = -0.140$ ) dan tidak signifikan ( $t = 0.614 < 2.042$ , *p value*

$0.539 > 0.05$ ). H2 tidak bisa dibuktikan, maka H2 ditolak.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah adalah positif ( $R^2 = 0.627$ ) dan signifikan ( $t = 4.852 > 2.042$ , *p value*  $0.000 < 0.05$ ). H3 bisa dibuktikan, maka H3 diterima.
4. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah adalah negatif ( $R^2 = -0.208$ ) dan tidak signifikan ( $t = 1.377 < 2.042$ , *p value*  $0.169 > 0.05$ ). H4 tidak bisa dibuktikan, maka H4 ditolak.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Hasil uji pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Partisipasi Masyarakat adalah negatif ( $R^2 = -0.331$ ) dan tidak signifikan ( $t = 1.499 < 2.042$ ,  $p \text{ value } 0.135 > 0.05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Partisipasi Masyarakat ditolak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang mengangkat isu serupa oleh Hernidyasari (2012). Ditolaknya hipotesis pertama (H1) mengindikasikan bahwa implementasi dari Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat khususnya di Kecamatan Murung Pudak.

Pengujian hipotesis kedua (H2) mengenai pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah adalah negatif ( $R^2 = -0.140$ ) dan tidak signifikan ( $t = 0.614 < 2.042$ ,

$p \text{ value } 0.539 > 0.05$ ). Hasil ini juga menolak hipotesis penelitian (H2) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jenawi (2008), Utari (2014) dan Ray (2017). Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi dari Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak.

Hasil uji hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah adalah positif ( $R^2 = 0.627$ ) dan signifikan ( $t = 4.852 > 2.042$ ,  $p \text{ value } 0.000 < 0.05$ ).

Berbeda dengan H1 dan H2, hasil uji H3 justru membuktikan bahwa terdapat pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sehingga H3 dapat diterima. Hasil ini

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

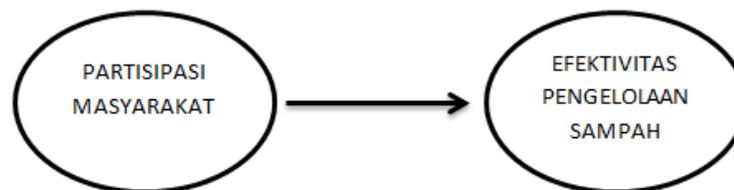
mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhafni (2016).

Hasil pengujian hipotesis terakhir (H4) mengenai pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah adalah negatif ( $R^2 = -0.208$ ) dan tidak signifikan ( $t = 1.377 < 2.042$ ,  $p \text{ value } 0.169 > 0.05$ ), dengan demikian H4 tidak bisa dibuktikan. Hipotesis mengenai pengaruh tidak langsung dengan variabel antara yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Partisipasi Masyarakat

terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong ditolak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, diketahui bahwa implementasi Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Tabalong khususnya di Kecamatan Murung Pudak tidak memberikan pengaruh signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah, sehingga model akhir hasil penelitian setelah evaluasi digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3. Model Akhir**



Sumber: Penelitian, 2017.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
2. Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektivitas pengelolaan sampah di



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten

Tabalong.

3. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
4. Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten tabalong tidak mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong khususnya Bagian Persampahan dirasa perlu melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Edisi 4. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hernidyasari, Yeni. 2012. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. *Skripsi*. Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Jenawi, Billy. 2008. Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Mikkelsen, B. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan Panduan Praktisi Lapangan*. Jakarta. OBOR.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Gramedia. Jakarta.
- Nurhafni. 2016. Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Prosiding Seminar Nasional "Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana"*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Ray, Raymundus I.W. 2017. Pengaruh Implementasi Kebijakan dan Kompetensi SDM terhadap Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Depok. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*. Vol. 3, No. 1, Juni 2017, pp. 18-34.

Utari, Dewi. 2014. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Efektivitas Penanganan Sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tabalong.